

## ABSTRAK

Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini sudah sangat memprihatinkan serta merugikan bagi bangsa maupun negara. Terkait dengan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pidana korupsi yang sejatinya sangat merugikan. Maka dari itu adanya peraturan yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Peraturan ini dibentuk untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan akibat dari adanya tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibentuk untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk dapat mengetahui “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.” Yang diperoleh penulis dari Kejaksaan Negeri Semarang.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, diawali dengan tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti, dan tahap gugatan perdata. Tahapan ini bertujuan untuk terwujudnya pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berupa Proses pelaksanaan atau eksekusi terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti memerlukan waktu yang relatif lama, selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa kerugian negara tersebut, selama dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum fakta serta alasan pendukung sampai sejauh mana patut dibebani pembayaran uang pengganti, serta menganggap remeh pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti. Disarankan perlunya mengganti pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti menjadi pidana pokok, menetapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti menjadi pidana tambahan yang bersifat imperatif, mempersingkat proses penyelesaian pelaksanaan pembayaran uang pengganti agar terlaksananya pembayaran kerugian negara lebih mudah terlaksana dan tidak semakin merugikan negara, dalam mengurangi kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi pihak Kejaksaan Negeri Semarang perlu mengadakan sosialisasi terkait bahayanya korupsi bagi kerugian bangsa dan perekonomian negara.

**Kata Kunci :** Pembayaran uang pengganti, tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Semarang

## **ABSTRACT**

*Recently, the case of corruption in Indonesia is very apprehensive and harm. Therefore, there is a regulation for people who corruption, it is called additional crimes payment. This regulation is created to restore Indonesia's finances that have been injured due to corruption. The aim of this research is to find out the implementation of obligation to pay substitute money on corruption case in Semarang District Prosecutor's Office.*

*The methodology of this research is sociological juridical. It is a procedure that is used to solve the research's problem by investigating the secondary data first after that the primary data in the field. The purpose of this methodology is to find out the data of "The Implementation of Obligation to Pay Substitute Money on Corruption Case" which is taken by the researcher from Semarang District Prosecutor's Office.*

*The result of this research is the first step to realize this action is billing, and then auctioning, after that paying substitute money and the last is civil action. The purpose of these actions is to achieve the payment of substitute money on corruption case by the criminals. The obstacles of this action are the execution of the criminals need a long time, and during the trial, the prosecutor cannot prove the state damage and also the facts or the support reasons about the crimes' obligation to pay substitute money. In addition, the criminals assume that the obligation to pay substitute money is trivial. Accordingly, the state needs to change the additional crimes payment into principal. The state also needs to establish the additional crimes payment into additional crimes which tend to be imperative. In addition, the state also needs to shorten the payment process, so it looks so easier than before and the state's damage can be reduced. In decreasing the damage of state, the prosecutor needs to hold the socialization about the danger of corruption for the state's damage and economy.*

**Keyword :** *Corruption, Payment Substitute Money, Semarang District Prosecutor's Office.*